

terlepas dari sifat dasar pertambangan yang tidak tergantikan *non-renewable*. Sektor-sektor alternatif yang dirasa produktif dan bernilai investasi tinggi harus diperhatikan dan diberdayakan dengan lebih giat diantaranya sektor pariwisata, sektor perikanan, sektor perkebunan dan pertanian serta sektor pembangunan infrastruktur yang pada saat ini masih kurang dikembangkan. Untuk Permasalahan penyelesaian sengketa pasal 154 seharusnya dalam pasal ini dipisahkan mana yang termasuk sengketa kontrak dan mana yang termasuk sengketa perizinan dan lembaga hukum mana yang berwenang terhadap kedua bentuk sengketa tersebut. Adanya bentuk intervensi negara memang memiliki dampak negatif terhadap perjanjian investasi dalam bidang pertambangan. Namun disisi lain akibat adanya intervensi negara membuka peluang terhadap perusahaan nasional seperti BUMN dan BUMD untuk berlomba agar dapat memanfaatkan potensi perusahaan melalui sumberdaya manusianya untuk bekerja demi mengelola pertambangan di Indonesia secara mandiri.

DAFTAR BACAAN

I. BUKU

- A.K, Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Adolf, Huala, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, cet. ke-4, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Badruzaman, Mariam Daruz, *et.al. Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Basah, Sjachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindakan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
- Batubara, Suleman dan Purba, Orinton, *Arbitrase Internasional*, Raih Asa Sukses, Bogor, 2013.
- Bruggink, J.J.H, alih bahasa Shidarta, Arif, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Burrows, Andrew, *The Law of Restitution*, Oxford University Press, New York, 2010.
- Fuadi, Munir, *Hukum Kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- ., *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Gautama, Sudargo, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- ., *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1976.

———., *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Binacipta, Bandung, 1977.

H.S, Salim dan Nurbani, Erlis Septiana, *Hukum Divestasi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

H.S, Salim dan Sutrisno, Budi, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

H.S, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

———., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 2007.

———., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Hadjon, Philipus M. *et.al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

Hasan, Madjedi, *Pacta Sunt Servanda Penerapan Asas “janji itu mengikat” Dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2005.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Perjanjian*, KENCANA, Jakarta, 2014.

Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan bagian pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Agoes, Etty R. *Pengantar Hukum Internasional*, P.T ALUMNI, Bandung, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rajagukguk, Erman, *Et.al.*, *Hukum Investasi*, Jakarta, 1995.

Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Satrio, J. , *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Simamora, Sogar, *HUKUM KONTRAK (Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia)*, Laksbang justisia, Surabaya, 2014.

Soenandar, Taryana, *Prinsip-prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995.

———., *Hukum perjanjian*, PT Intermasa, jakarta, 2002.

———., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 2003.

Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Trihastuti, Nanik, *Hukum Kontrak Karya*, Setara Press, Malang, 2013.

Udiana, I made, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Bali, 2011.

II. INTERNET

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/7040/Tolak-Bangun-Smelter,-Menperin:-Silahkan-Angkat-Kaki-dari-Indonesia>.

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=820>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fdb23af4a0d9/arti-bagian-%E2%80%9Cmengingat%E2%80%9D-dalam-peraturan-perundang-undangan>.

<http://www.hukumonline.com/>.

<http://www.suara.com>

www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10726/2442/.

www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10726/2442/.

III. PERATURAN

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara .

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

IV. LAIN-LAIN

Ari Wahyudi Hertanto, *Kontrak Karya (Suatu Kajian Hukum Keperdataan)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 April No.2 April-Juni 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas kebebasan berkontrak*, Yuridika, Volume 18 No.3, Mei tahun 2003.

Warta Minerba, *Meningkatkan kinerja subsektor Pertambangan*, Majalah Dirjen. Minerba, Edisi XV, 2013.